

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2012, *Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Adjie, Habib, 2008, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- AP, Parlindungan, 1982, *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata Cara Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Alumni, Bandung.
- Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta.
- Harsono Budi, 2013, *Hukum Agraria Indoensia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Universitas Tris Sakti, Jakarta.
- HS, Salim, 2019, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Remi, Sutan Sjahdeini, 1999, *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung.
- Rozak, 2008, *Kodifikasi Materi Hak Tanggungan*, Erlangga, Jakarta.
- S Meliala, Djaja, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soeprapto, Hadi Hartono, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.

Sunandar, 2010, *Materi Unsur-Unsur Hak Tanggungan Indonesia*, Arya Wira Praja, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jenie, Siti Ismijatie, Yuniarlin, Prihati dan Musjtari, Dewi Nurul, 2019, *Pengantar Hukum Jaminan di Indonesia*, LP3M UMY, Yogyakarta.

Lubis, Sulhan Irwansyah dan Syahnel Anhar, 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.

Winarsasi, Putri Ayi, 2020, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuatan

Akta Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satu Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630.

Peraturan Menteri Agama dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, Berita Negara tahun 2020 Nomor 349.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52.

Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 395 Tahun 2018.

Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 349.

### C. Jurnal

Aprima dan Dwi Tiffany, “Keabsahan Hukum Kredit Di Bawah Tangan, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan”, *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, Volume 6, Nomor 2, 4 November 2022, hlm. 2789.

Dewi, IGA Gangga Santi dan Mira Novana, “Kebijakan Penjaminan Tanah Melalui Hak Tanggungan di Indonesia (Studi Penjaminan Hak Tanggungan Elektronik di Kabupaten Badung Provinsi Bali)”, *Law Development & Justice Review*, Volume 3, Nomor 1, Mei 2020, hlm. 59.

Gunarta, I Made Dwi, Akur Nurasa, dan Sukmo Pamuji, “Presepsi Kreditor dan PPAT terhadap Kualitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik”, *Jurnal Tunas Agraria*, Volume 3, Nomor 3, September 2020, hlm. 87.

Lastuti Abubakar, “Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaharuan Hukum Jaminan Nasional)”, *Buletin Hukum Kebanksentralan*, Volume 12, Nomor 1, 2015, hlm. 2.

Pandam, Nurwulan, “Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Bagi Kreditur dan Pejabat Pembuat Akta Tanah”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor 1, Volume 28, Januari 2021, hlm.185.

Wibawa, Kadek Cahya Susila, “Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid”, *Jurnal Crepido Volume 01, Nomor 01*, 2019, hlm. 46.

Wiguna, I Wayan Jody Bagus, “Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Volume 05 Nomor 01, April 2020, hlm. 80.

#### **D. Tesis**

Devi, Sri. “Kendala Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2021.

Meiyona, Ulfa Riffilah. “Tanggungjawab PPAT Terhadap Pembuatan Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2021.